

PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DI BALI SEBAGAI KONEKTIVITAS INDUSTRI PARIWISATA

I Made Agus Mahendra

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Email: made.agusmahendra@gmail.com

Abstrak – Pengembangan kawasan Perkotaan dewasa ini semakin pesat, berbagai komponen kota menjadi sebuah keberhasilan dalam pengembangan dan penataan Kota terpadu. Perencanaan kota merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah rencana kota kedepannya. Perencanaan kota akan menjadi lebih baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami antara kekuatan pemerintah dan swasta yang saling melengkapi satu sama lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik dengan data yang diolah secara kualitatif. Data berupa literatur dan peta dikumpulkan untuk melihat tanda-tanda dan temuan di lapangan. Kemudian menyusun konsepsualisasi teoritik berdasarkan teori-teori yang ada dari variabel penelitian. Perencanaan secara keseluruhan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja melainkan harus secara sinergitas bersama dengan semua pemangku kepentingan. Disisi pemerintahan, perencanaan kota harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah perkotaan dan wilayah tertentu, yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan. Perencanaan kota juga harus sesuai dengan budaya dan keadaan sosial masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut. Karena pada hakekatnya perencanaan kota di buat untuk memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan kemudahan, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami kota tersebut. Konektivitas jalur antar Kota yang baik dapat memberikan kontribusi besar Terhadap tujuan Pariwisata di Masing-masing Kota/Daerah. Kedepan Akan menjadi sebuah karya Besar jika Pengembangan Kawasan Perkotaan Di Pulau Bali sebagai konektivitas jalur Industri Pariwisata yang terintegrasi dalam satu buah guideline Perencanaan Kota

Kata kunci: Kota, Perencanaan Kota , Industri Pariwisata , Pariwisata bali

Abstract - Development of Urban Areas Today More Rapidly, various components of the city become a success in the development and structuring of an integrated City. City planning is an activity to formulate a policy that can be used to make a city plan in the future. Urban planning will be better, if there is harmony and mutual understanding between government and private forces that complement each other. This study uses a rationalistic approach with data that is processed qualitatively. Data in the form of literature and maps were collected to see signs and findings in the field. Then compile theoretical conceptualization based on existing theories of the research variables. Planning as a whole cannot only be done by one or several people but must be synergistic with all stakeholders. The role of government, city planning must be in accordance with the legislation applies to certain urban and regional areas, which are related to health, safety and community welfare, land use, distribution of parcels and environmental quality. Urban planning must also be in accordance with the culture and social conditions of the people living in the city. Because in essence city planning is made to provide security, comfort, provide convenience, and can even improve the welfare of the people who inhabit the city. Good intercity connectivity can provide a major contribution to tourism destinations in each city / region. In the future, it will be a great work if the development of urban areas on the island of Bali as a connectivity path for the tourism industry is integrated into one urban planning guideline

Keywords: City, City Planning, Tourism Industry, Tourism Bali

PENDAHULUAN

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia hidup di daerah perkotaan, dan kecenderungan ini meningkat dengan cepat, termasuk di negara berkembang dan kota berkembang (lihat Kourtit, 2015). Kecenderungan ini, telah menjadikan

semakin banyak parameter penting pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Kashef, 2016). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan konsep 'lingkungan hidup' pada tahun 1961, mengingat bahwa lingkungan hidup yang sesuai harus memenuhi setidaknya empat dasar kondisi:

keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kenyamanan (Higasa & Hibata, 1977). Evans (2002) menekankan khususnya pentingnya keberlanjutan saat mempertimbangkan kota yang layak huni.

Penelitian yang dilakukan tentang pengembangan kawasan Perkotaan dengan berbagai penekanan yang diangkat seperti dilakukan oleh Joseph Cho-Yam Lau(2012) menyatakan Studi ini menunjukkan bahwa Model perencanaan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dasar akan perjalanan, untuk mengidentifikasi tuntutan perjalanan dari orang yang tidak mampu dan masyarakat menyarankan agar kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki seluruh perjalanan untuk mencapai akses yang sama untuk semua Model perencanaan ini bisa digunakan untuk menyempurnakan perencanaan model transportasi perkotaan yang konvensional, yang menempatkan terlalu banyak tekanan pada sisi penawaran dan penyediaan sarana transportasi untuk memenuhi perkiraan permintaan perjalanan Davide Genelettia et al(2017) menyatakan tentang pendekatan penerapan perencanaan yang berkelanjutan di pinggiran kota. Apa yang muncul dari tinjauan tersebut adalah citra beragam dari jenis pinggiran kota, sulit untuk dikurangi dan dikelompokkan. Sebagai konsekuensinya, perencanaan dan alur penelitian menjadi beragam. Secara keseluruhan, kami menemukan bahwa penelitian pinggiran kota bukanlah perencanaan yang berkelanjutan, dan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada pemecahan masalah spesifik konteks daripada menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk perencanaan berkelanjutan.

(Rui Alexandre Castanhoea et al,2017) Menyatakan Umumnya, meningkatkan aksesibilitas transportasi, juga untuk menumbuhkan a transportasi berkelanjutan, memerlukan implementasi inovasi / indikator kreatif dan konsep aksesibilitas yang merespons tantangan sebenarnya Melalui penelitian ini pentingnya aksesibilitas sebagai Ukuran kualitas interaksi antar transportasi sistem di wilayah CBC telah ditunjukkan. Apalagi aksesibilitas telah terbukti bermanfaat bagi perencana transportasi, untuk menilai dan menentukan prioritas, dan juga untuk menentukan peringkat daerah berdasarkan skala regional. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa faktor penting untuk pengembangan wilayah adalah mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil. Dalam hal ini, aksesibilitas dan

konektivitas menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan pada tingkat yang berbeda, menargetkan tiga skala geografis yaitu : (1) aksesibilitas di dalam area CBC; (2) antara negara Eropa (3) antara Negara Uni Emirat Arab dan wilayah lainnya di Dunia. Di dalam Perhatian temuan yang diperoleh, diidentifikasi dengan jelas bahwa aspek semacam itu perlu dilakukan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan CBC, mengingat hal yang sama tingkat kemampuan mereka untuk mempromosikan ekonomi yang layak dan daya tariknya dari daerahnya masing-masing, dimana penghuni dan pengunjung dapat menikmati akses konektivitas yang baik antara, perumahan, layanan, alam dan aset budaya secara berkelanjutan. Johannes Mueller et al (2017) pada penelitiannya menyatakan strategi baru desain perkotaan dengan tujuan untuk mengatasi perspektif teknologi urban saat ini dengan metode perencanaan menuju pendekatan perencanaan partisipatif. Kelemahan perencanaan partisipatif yang kita fokuskan adalah representasi rendahnya proses intensif dari kegiatan lokakarya dan tatap muka.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap strategi Pengembangan Kawasan Kota sebagai konektivitas industri pariwisata yang berkelanjutan. Pemilihan topik penelitian ini didasarkan kepada masih banyaknya pariwisata yang belum terintegrasi kepada kawasan perkotaan sebagai roda penggerak perekonomian. Pada tingkat kota dan pemerintah daerah, strategi Pengembangan pembangunan dan rencana pembangunan kota memprioritaskan kepada konektivitas antar titik-titik wisata yang menjadi daya Tarik wisatawan yang berkunjung. mendorong sinergi dan interaksi di antara beberapa kawasan perkotaan yang terpisah untuk menyatukan konsep strategi keberlanjutan fungsi kawasan.. Perluasan perkotaan dan rencana pengisian kegiatan yang tumbuh dari dalam kawasan (infill) dapat meminimalkan biaya transportasi dan sebagai konektivitas industri pariwisata di sebuah daerah perkotaan Spektrum metode perencanaan konektivitas yang terintegrasi dapat memberikan sebuah strategi baru dalam pengembangan kawasan perkotaan

RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh konektivitas terhadap perkembangan

kawasan perkotaan yang memiliki tujuan wisata ?

2. Bagaimana strategi pengembangan kawasan perkotaan terhadap konektivitas industri pariwisata
3. Seberapa besar industri pariwisata berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perkotaan ?

TUJUAN

1. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh konektivitas terhadap perkembangan kawasan perkotaan yang memiliki tujuan wisata
2. Mengetahui strategi pengembangan kawasan perkotaan terhadap konektivitas industri pariwisata yang berkelanjutan
3. Mengetahui Seberapa besar industri pariwisata berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perkotaan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik dengan data yang diolah secara kualitatif. Data berupa literatur dan peta dikumpulkan untuk melihat tanda-tanda dan temuan di lapangan. Kemudian menyusun konsepsualisasi teoritik berdasarkan teori-teori yang ada dari variabel penelitian.

Dalam penelitian ini juga dilakukan proses *deduksi* yaitu usaha menjelaskan atau meramalkan tentang adanya fakta/ kejadian di lokasi penelitian menurut landasan teori yang sudah diperoleh. Ini juga digunakan untuk menyusun konseptualisasi teoritik untuk melihat kesatuan holistik permasalahan yang ada pada kawasan Perkotaan Di Pulau Bali.

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengembangan Kawasan Perkotaan	Infrastruktur	Ketersediaan Fasilitas kebersihan
		Ketersediaan sarana Prasarana jalan
		Transportasi
	Aksesibilitas	Keterhubungan spot –spot

	Facilitas dan Pelayanan	Kelengkapan kualitas SDM
		Sistem keterhubungan kawasan
	Elemen institusi	Dukungan Pemerintah
	Sasaran Pencapaian	Konektivitas pariwisata
		Perkembangan kawasan perkotaan yang merata

PEMBAHASAN

Perencanaan kota merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah rencana kota kedepannya. Perencanaan kota akan menjadi lebih baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami antara kekuatan pemerintah dan swasta yang saling melengkapi satu sama lainnya. Perencanaan secara keseluruhan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja. Dari sisi pemerintahan, perencanaan kota harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah perkotaan dan wilayah tertentu, yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan. Perencanaan kota juga harus sesuai dengan budaya dan keadaan sosial masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut. Karena pada hakekatnya perencanaan kota di buat untuk memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan kemudahan, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami kota tersebut.

Budaya Merupakan sebuah kunci untuk mempromosikan pembangunan kembali perkotaan yang berkelanjutan, dengan melestarikan identitas perkotaan, menarik aktivitas dan pengunjung, serta membina kualitas hidup (UNESCO, 2015).

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Melihat trend pariwisata tahun 2020, perjalanan wisata dunia akan mencapai 1,6 milyar orang pemerintah untuk

menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan dampak pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. Dengan demikian maka pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

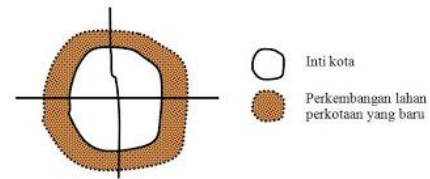
Kajian Pustaka

Pola-Pola Perkembangan Kota

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan, yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (*fringe area*). Gejala penjarangan areal kota ini disebut sebagai "invasion" dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai "*urban sprawl*" (Northam dalam Yunus, 1994).

Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (1994) penjarangan fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

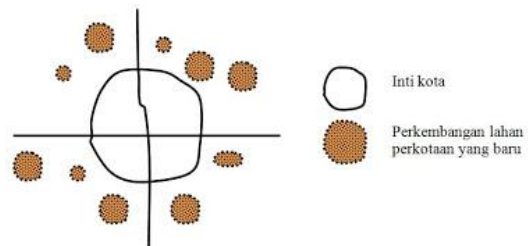
a) Penjarangan fisik kota yang mempunyai sifat rata pada bagian luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan konsentris (*concentric development*).



Gambar 1. Model Penjarangan Fisik kota Secara Konsentris
Sumber: Northam dalam Yunus (1994)

b) Penjarangan fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjarangan yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (*ribbon/linear/axial development*).

c) Penjarangan fisik kota yang tidak mengikuti pola tertentu disebut sebagai perkembangan yang meloncat (*leap frog/chequer board development*).



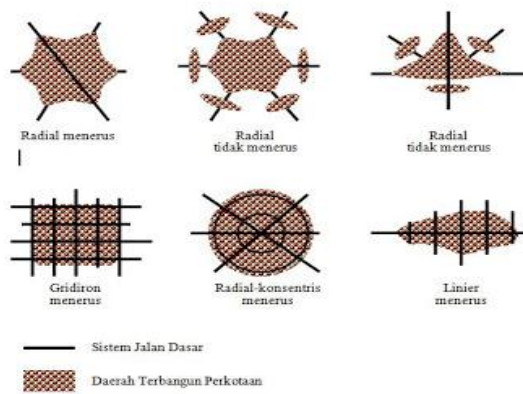
Gambar 3. Model Penjarangan Fisik Kota Secara Meloncat
Sumber: Northam dalam Yunus (1994)

Jenis penjarangan fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998), secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut :

1) Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau "star shape".

2) Daerah-daerah hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.



Gambar 4. Enam Pola Perkembangan Fisik Kota Menurut Branch
Sumber : Branch (1995)

3) Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.

Menurut Northam dalam Yunus (1994), mengenai perkembangan fisik kota secara konsentris, Branch (1995) mengemukakan enam pola perkembangan fisik kota, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

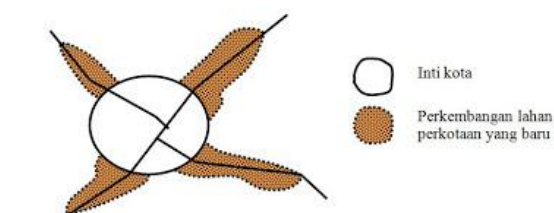
Selanjutnya berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis penjarangan areal kota yang ada, menurut Hudson dalam Yunus (1994) mengemukakan beberapa model bentuk kota, yaitu sebagai berikut :

a) Bentuk satelit dan pusat-pusat baru. Bentuk ini menggambarkan kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya terjalin sedemikian rupa, sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan lebih efisien.

b) Bentuk stellar atau radial. Bentuk kota ini untuk kota yang perkembangan kotanya didominasi oleh "ribbon development".

c) Bentuk cincin, terdiri dari beberapa kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar.

d) Bentuk linier bermanik, pertumbuhan areal-areal kota hanya terbatas di sepanjang jalan utama dan pola umumnya linier. Pada pola ini ada kesempatan untuk berkembang ke arah samping tanpa kendala fisik.

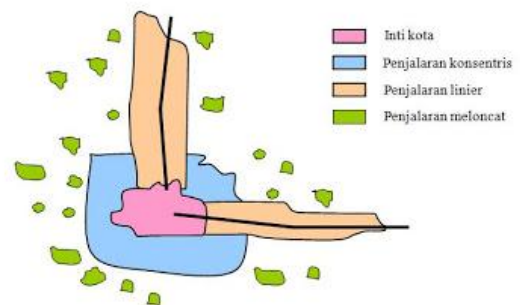


Gambar 2. Model Penjarangan Fisik Kota Secara Memanjang/Linier
Sumber: Northam dalam Yunus (1994)

e) Bentuk inti/kompak, merupakan bentuk perkembangan areal kota yang biasanya didominasi oleh perkembangan vertikal.

f) Bentuk memencar, merupakan bentuk dengan kesatuan morfologi yang besar dan kompak dengan beberapa "urban centers", namun masing-masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, tentang pola-pola perkembangan fisik kota, pada dasarnya memiliki banyak persamaan. Namun secara umum pola perkembangan fisik kota dapat dibedakan menjadi perkembangan memusat, perkembangan memanjang mengikuti pola jaringan jalan dan perkembangan meloncat membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru.

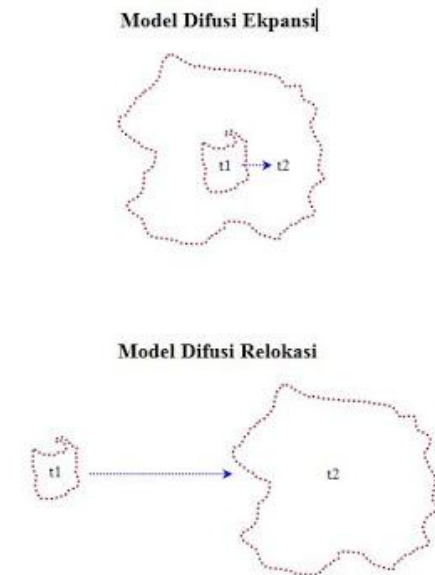


Gambar 5 . Model Penjarangan Fisik Kota
Sumber: Northam dalam Yunus (1994)

Dalam mengkaji perkembangan fisik suatu kota, menurut Hagget (1970) dapat mengacu pada teori difusi atau teori penyebaran/penjarangan yang mempunyai dua model yang masing-masing memiliki maksud yang berbeda. Model-model tersebut adalah model difusi ekspansi dan model difusi relokasi, dengan penjelasan berikut ini :

1) Model difusi ekspansi (expansion diffusion) adalah suatu proses penyebaran informasi, material dan sebagainya yang menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam proses difusi ekspansi ini informasi atau material yang didifusikan tetap ada dan kadang-kadang menjadi lebih intensif di tempat asalnya. Salah satu contoh proses difusi ekspansi adalah terjadinya pertambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu yang dibedakan dalam dua periode waktu. Dengan demikian dalam ekspansi ruang terdapat pertumbuhan jumlah penduduk, material dan ruang hunian baru.

2) Model difusi yang lainnya adalah difusi relokasi (relocation diffusion) adalah suatu proses yang penyebaran keruangan, yaitu informasi atau material yang didifusikan meninggalkan daerah asal dan berpindah ke daerah yang baru.



Gambar 6 . Model Difusi Ekspansi dan Relokasi
Sumber : Hagget (1970)

Untuk lebih jelasnya kedua metode difusi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini :

Teori Desain Spasial Kota

Menurut Tracik (1986) dalam suatu lingkungan permukiman ada rangkaian antara figure ground, linkage dan palace. Figure ground menekankan adanya public civics space atau open space pada kota sebagai figure.

Melalui figure ground plan dapat diketahui antara lain pola atau tipologi, konfigurasi solid void yang merupakan elemntal kawasan atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya. Komunikasi antara privat dan publik tercipta secara langsung. Ruang yang mengurung (enclosure) merupakan void yang paling dominan, berskala manusia (dalam lingkup sudut pandang mata 25-30 derajat) void adalah ruang luar yang berskala interior, dimana ruang tersebut seperti di dalam bangunan, sehingga ruang luar yang enclosure terasa seperti interior. Diperlukan keakraban antara bangunan sebagai private

domain dan ruang luar sebagai public dominan yang menyatu.

a. Dalam "linkage theory" sirkulasi merupakan penekanan pada hubungan pergerakan yang merupakan kontribusi yang sangat penting. Menurut *Fumihiko Maki*, Linkage secara sederhana adalah perekat, yaitu suatu kegiatan yang menyatukan seluruh lapisan aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik kota, dalam teorinya dibedakan menjadi tiga tipe ruang kota formal, yaitu : *Composition form*, *Megaform* dan *groupform*. Teori linkage yang dapat diterapkan dalam kajian ini adalah group form yang merupakan ciri khas dari bentuk-bentuk spasial kota yang mempunyai kajian sejarah. Linkage ini tidak terbentuk secara langsung tetapi selalu dihubungkan dengan karakteristik fisik skala manusia, rentetan-rentetan space yang dipertegas oleh bangunan, dinding, pintu gerbang, dan juga jalan yang membentuk fasade suatu lingkungan perkampungan. *Linkage theory* ini dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan arahan dalam penataan suatu kawasan (lingkungan). Dalam konteks urban design, linkage menunjukkan hubungan pergerakan yang terjadi pada beberapa bagian zone makro dan mikro, dengan atau tanpa aspek keragaman fungsi yang berkaitan dengan fisik, historis, ekonomi, sosial, budaya dan politik (*danarti Karsono, 1996*).

- b. Menurut *Shirvani (1985)*, linkage menggambarkan keterkaitan elemen bentuk dan tatanan masa bangunan, dimana pengertian bentuk dan tatanan massa bangunan tersebut akan meningkatkan fungsi kehidupan dan makna dari tempat tersebut. Karena konfigurasi dan penampilan massa bangunan dapat membentuk, mengarahkan, menjadi orientasi yang mendukung elemen linkage tersebut.
- c. *Figure ground theory dan linkage theory* ditekankan pada konfigurasi massa fisik , dalam place theory ditekankan bahwa integrasi kota tidak hanya terletak pada konfigurasi fisik morfologi, tetapi integrasi antara aspek fisik morfologi ruang dengan masyarakat atau manusia yang merupakan tujuan utama dari teori ini, melalui pandangan bahwa urban design pada dasarnya bertujuan untuk memberikan wadah kehidupan yang baik untuk penggunaan ruang kota baik publik maupun privat.
- d. *Place theory* dalam spasial design yaitu pemahaman tentang *culture* dan

karakteristik suatu daerah yang ada menjadi ciri khas untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan agar penghuni (masyarakat) tidak merasa asing di dalam lingkungannya. Sebagaimana tempat mempunyai masa lalu (*linkage history*), tempat juga terus berkembang pada masa berikutnya. Artinya, nilai sejarah sangat penting dalam suatu kawasan kota. Aspek spesifik lingkungan menjadi indikator yang sangat penting dalam menggali potensi, mengatur tingkat perubahan serta kemungkinan pengembangan di masa datang, teori ini memberikan pengertian bahwa semakin penting nilai-nilai sosial dan budaya, dengan kaitan sejarah di dalam suatu ruang kota

Perencanaan Pariwisata

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Inskeep (1991:29), terdapat beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata, diantaranya:

1. *Continuous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada.
2. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem.
3. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
4. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
5. *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan dimanajementi dalam cara dimana sumber penurunan kualitas dan diharapkan tetap

dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.

6. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.

7. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistis dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi

8. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas

Menurut Godfrey & Clarke "*Goals and Objectives*" yang realistis adalah inti untuk pengembangan pariwisata yang bersukses.

Tourism Action Steps menyangkut siapa, apa, dimana dan bagaimana yang menjelaskan bagaimana caranya *goals and objectives* akan dilaksanakan. Tindakan pariwisata menyatakan apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan dan oleh siapa. *Tourism Action Steps*

harus jelas dan mempunyai jangka waktu yang ditentukan dan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tindakan itu dapat didelegasikan secara individu atau berkelompok. Menurut Godfrey and Clarke proses membentuk strategi pariwisata terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. *Identifying Opportunities and Constraints (Based on an evacuation of supply and demand)*.
2. *Setting development Goals and Objective (Addressing issues needing attention in the short, medium and longer term)*.
3. *Define a series of action steps (Designed to achieve the goals and objectives within some specified time frame)*.

Pengembangan kawasan Perkotaan dewasa Ini Semakin Pesat, berbagai komponen kota menjadi sebuah keberhasilan dalam pengembangan dan penataan Kota terpadu. Perencanaan kota, seperti yang

didefinisikan oleh Taylor (1998) dan banyak dikutip, adalah proses teknis dan politik yang berhubungan dengan pengendalian penggunaan tanah dan desain lingkungan perkotaan, termasuk di dalamnya jaringan transportasi, untuk membimbing dan memastikan perkembangan pemukiman yang tertib di masyarakat. Ini telah terjadi sejak awal peradaban, namun sebenarnya perencanaan modern (perencanaan modernis) mulai diperkenalkan tahun 1850 (Benevolo, 1967; UN-Habitat, 2009). Pentingnya Perencanaan kota telah diakui oleh kedua peneliti tersebut seperti di Hall (2000, 2002) dan Taylor (1998) dan kenyataannya semua kota yang berkembang dan terorganisir dengan baik telah mengalami tahap pengembangan berdasarkan rencana yang baik. Namun, masalahnya adalah bahwa perencanaan kota dipandang lemah dan tidak efektif di banyak tempat (Belsky et al., 2013; Bertaud, 2004; UN-Habitat, 2009; Dunia Bank, 2009). Hal ini membuat kota-kota menjadi kurang berkembang dan tidak terintegrasi dengan baik

konektivitas terhadap perkembangan kawasan perkotaan yang memiliki tujuan wisata

Perencanaan kota merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah rencana kota kedepannya. Perencanaan kota akan menjadi lebih baik, jika terdapat keselarasan dan saling memahami antara kekuatan pemerintah dan swasta yang saling melengkapi satu sama lainnya. Perencanaan secara keseluruhan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang saja. Dari sisi pemerintahan, perencanaan kota harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah perkotaan dan wilayah tertentu, yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, penggunaan tanah, pembagian persil dan kualitas lingkungan. Perencanaan kota juga harus sesuai dengan budaya dan keadaan sosial masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut. Karena pada hakekatnya perencanaan kota di buat untuk memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan kemudahan, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami kota tersebut.

Perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity core merupakan sebuah hal yang mutlak

untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung. Namun disisi lain, elemen lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari stakeholder dan juga sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan kawasan tersebut baik dampak positif maupun negative yang akan ditimbulkan. Inskip & Gunn (1994), mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada beberapa aspek yaitu: 1) Mempertahankan/ menjaga kelestarian lingkungannya; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut; 3) Menjamin kepuasan pengunjung; 4) Meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya Konsep pembangunan pariwisata "Tourism Area Life Cycle of Evolution" oleh Butler, yang dikatakan oleh Butler 1980 dalam, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata terdapat enam tahapan yang penting, yaitu : 1) Tahap Penemuan (Exploration); 2) Tahap Pelibatan (Involvement); 3) Tahap Pengembangan (Development); 4) Tahap Konsolidasi (Consolidation); 5) Tahap Stagnasi (Stagnation); 6) Tahap Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation)

strategi pengembangan kawasan perkotaan terhadap konektivitas industri pariwisata

Strategi Pengembangan Pariwisata Core Strategy (Strategy Utama) Core strategy atau strategi utama pengembangan wisata yang terdiri dari costumer strategy dengan menjelaskan brand image strategy yaitu dengan menjelaskan obyek dan produk unggulan dengan tema-tema tertentu yang kompetitif. Dalam pengembangan Core Strategy ada beberapa komponen yaitu : 1) Strategi Pengembangan Perwilayahan Pariwisata; 2) Strategi Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur; 3) Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata

Strategi pengembangan kota tidak lepas dari adanya Kebijakan pariwisata yang memberikan filsafat mendasar dalam strategi pembangunan kota untuk menentukan arah pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan

akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam strategi pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan factor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Inskeep (1991:29), ada beberapa pendekatan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan pariwisata (Inskeep 1991:29), diantaranya:

1. *Continous Incremental, and Flexible Approach*, dimana perencanaan dilihat sebagai proses yang akan terus berlangsung didasarkan pada kebutuhan dengan memonitor feed back yang ada.
2. *System Approach*, dimana pariwisata dipandang sebagai hubungan sistem dan perlu direncanakan seperti dengan teknik analisa sistem.
3. *Comprehensive Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem diatas, dimana semua aspek dari pengembangan pariwisata termasuk didalamnya institusi elemen dan lingkungan serta implikasi sosial ekonomi, sebagai pendekatan holistik.
4. *Integrated Approach*, berhubungan dengan pendekatan sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem dan keseluruhan dimana pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh rencana dan total bentuk pengembangan pada area.
5. *Environmental and sustainable development approach*, pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan mempunyai manajemen dalam cara dimana sumber daya alam dan budaya tidak mengalami penurunan kualitas dan diharapkan tetap dapat lestari sehingga analisa daya dukung lingkungan perlu diterapkan pada pendekatan ini.
6. *Community Approach*, pendekatan yang didukung dan dikemukakan juga oleh Peter Murphy (1991) menekankan pada pentingnya memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata, untuk dapat meningkatkan yang diinginkan dan kemungkinan, perlu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan manajemen yang dilaksanakan dalam pariwisata dan manfaatnya terhadap sosial ekonomi.
7. *Implementable Approach*, kebijakan pengembangan pariwisata, rencana, dan rekomendasi diformulasikan menjadi realistik dan dapat diterapkan, dengan tehnik yang digunakan adalah tehnik implementasi termasuk pengembangan, program aksi atau strategi, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengadopsi.

8. *Application of systematic planning approach*, pendekatan ini diaplikasikan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan logika dari aktivitas

Pengaruh industri pariwisata terhadap perkembangan kawasan perkotaan.

Namun perlu disadari dan diperhatikan bahwa perkembangan pariwisata ini tidak selamanya menguntungkan bagi kehidupan ekonomi. Dampak negatif yang mungkin muncul adalah terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Misalnya pertumbuhan ekonomi kota tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi pedesaan artinya pertumbuhan ekonomi kota jauh lebih baik dari masyarakat desa. Hal ini bisa saja terjadi karena kota lebih banyak fasilitas yang memberi banyak kemudahan para wisatawan. Sedangkan masyarakat sekitar obyek wisata tidak begitu saling mempengaruhi secara mendalam. Bali yang dinyatakan sebagai daerah tujuan wisata pertama di Indonesia memiliki atraksi-atraksi budaya yang sangat menarik, kaitanya dengan perkembangan pariwisata, khususnya di daerah perkotaan Bali memberikan dampak sosial budaya terhadap masyarakat disekitar kawasan wisata. Secara garis besar ditunjukkan bahwa perkembangan pariwisata ini membawa dampak terjadinya perubahan-perubahan sosial. Perubahan ini justru karena wisatawan mancanegara yang datang dengan budayanya itu secara tidak langsung menyebabkan terjadi proses akulturasi

Perkembangan suatu perkotaan telah menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada keberadaan RTH sebagai salah satu ekosistem kota menjadi kurang diperhatikan, walaupun keberadaan RTH diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan (Zoer'aeni, 1995). Tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang dan lahan untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, menyebabkan ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Peningkatan kebutuhan lahan tersebut dapat ditinjau dari dua fenomena utama di daerah perkotaan, yaitu ekspansi daerah terbangun pada daerah non terbangun dan terjadinya densifikasi bangunan pada daerah terbangun (Suharyadi, 2011)

Dampak pariwisata yang lain adalah tampak pada perencanaan tata ruang perkotaan di

daerah bali. Yang sebagian besar mengakomodasi kepentingan industri pariwisata dengan perubahan tata ruang dari kawasan hijau menjadi kawasan perumahan komersialisasi lahan dan peningkatan jumlah akomodasi pariwisata hotel berupa hotel, home stay dan kondominium mini yang menyebabkan perkembangan pembangunan perkotaan semakin tidak terkendali

Dampak pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. unsur-unsur budaya yang dimiliki. Untuk daerah wisata yang sudah terlanjur bercampur dengan budaya luar yang telah beradaptasi disana maka dipetakanlah ruang-ruang tersebut sebagai daya tarik tersendiri sebagai keberlanjutan pariwisata kedepannya

KESIMPULAN

1. Pengaruh yang ditimbulkan oleh konektivitas terhadap perkembangan kawasan perkotaan. Konektivitas kawasan kota serta pariwisata memainkan peranan penting dalam interaksi hubungan antara ruang perkotaan, jaringan transportasi, konektivitas pariwisata, serta peningkatan kualitas kota dari segala aspek. Aktivitas penduduk membutuhkan sarana dan prasarana penunjang, terutama untuk pergerakan mereka dari satu fungsi kegiatan ke fungsi kegiatan lainnya. Oleh karena itu selayaknya pertumbuhan dan perkembangan kota diimbangi dengan pertumbuhan dan perkembangan prasarana jalan sebagai media pergerakan penduduk. Jaringan jalan perkotaan didesain sedemikian rupa memiliki hirarki yang tersusun secara sistematis dalam menampung pergerakan penduduk. Konektivitas jaringan jalan akan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pergerakan yang ditampungnya.
2. Strategi pengembangan kawasan perkotaan terhadap konektivitas industri pariwisata Strategi pengembangan kota tidak lepas dari adanya Kebijakan pariwisata yang memberikan filsafat mendasar dalam strategi pembangunan kota untuk menentukan arah pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam strategi pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.
Strategi pengembangan kota tidak lepas dari adanya Kebijakan pariwisata yang memberikan filsafat mendasar dalam strategi pembangunan kota untuk menentukan arah pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam strategi pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.
Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar
3. Industri pariwisata berpengaruh terhadap perkembangan kawasan perkotaan Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan elemen pendukungnya. Secara umum kota dibentuk dari beberapa elemen yang tersusun dalam struktur ruang kota dengan pola dan bentuk tertentu. Bentuk, struktur, dan pola kota dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika kegiatan yang diwadahnya. Kegiatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika penduduk, pertumbuhan penduduk menjadi salah satu variabel penentu dalam perubahan kondisi perkotaan.
Dengan demikian maka pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat serta diperlukan adanya pemetaan-pemetaan atau mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di

Bali menjadi wilayah yang cukup matang dan kuat nilai-nilai eksotik yang ditawarkan tanpa menghilangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kota Optimum, Efisien, dan Mandiri. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Branch, Melville. 1995: Perencanaan Kota Komprehensif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.Yogyakarta
- Budiharjo, Eko. 1998 : Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Bandung : Penerbit Alumni, Bandung
- Budihardjo, Eko, 1997, Tata Ruang Perkotaan, Penerbit Alumni, Bandung
- Djunaedi, Achmad, 1994, Kajian Teoritik Pembangunan Kota Baru di Indonesia, Makalah Seminar Perencanaan dan Perancangan Kota Baru tanggal 17 November 1994, Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Karyoedi, Mochtar, 1993, Pengembangan Kota Baru di Indonesia, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- M Sastra, Suparno., & Marlina, Endy. 2006. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan. Yogyakarta : ANDI.
- Pamudji, S, 1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sobirin. 2001. Distribusi Permukiman dan Prasarana Kota : Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia, dalam Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus. Jakarta : UI Press.
- Surtiani, Eny Endang. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga). Tesis. Semarang : Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana – Universitas Diponegoro Semarang.
- Sujarto, Djoko, 1991, Aspek Kepranataan Pembangunan Kota Baru, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Sujarto, Djoko, 1991, Perencanaan Kota dan Kebijakan Perencanaan Kota di Indonesia, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Sujarto, Djoko, 1993, Perkembangan Kota Baru, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Bandung
- Sujarto, Djoko, 1993, Kinerja dan Dampak Tata Ruang dalam Pembangunan Kota Baru. Studi Kasus Kota terpadu Bumi Bekasi Baru, Desertasi Bidang Ilmu Teknik ITB, Bandung
- Yunus, Hadi Sabari, 2001, Struktur Tata Ruang Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari, 2005, Klasifikasi Kota, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari, 2008, Manajemen Kota. Perspektif Spasial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yunus, Hadi Sabari. 1982. Klasifikasi Permukiman Kota (Tinjauan Makro). Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Yunus, Hadi Sabari. 1999. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.